

Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi

Prof. Lincoln Arsyad



PENDAHULUAN

Modul 1 ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memahami konsep dan paradigma-paradigma pembangunan ekonomi yang berkembang hingga saat ini. Pada modul ini, dijelaskan evolusi makna pembangunan dan indikator-indikator pembangunan.

Setelah mempelajari modul ini, secara umum, Anda diharapkan dapat menjelaskan evolusi makna pembangunan dan berbagai indikator pembangunan. Setelah mempelajari modul ini, secara khusus Anda diharapkan dapat:

1. menjelaskan konsep-konsep dasar pembangunan;
2. menjelaskan perkembangan makna pembangunan;
3. menjelaskan paradigma-paradigma yang ada, berkaitan dengan makna pembangunan.

KEGIATAN BELAJAR 1

Evolusi Makna Pembangunan

A. EVOLUSI FOKUS EKONOMI PEMBANGUNAN

Seperti telah dibahas pada modul Ekonomi Pembangunan 1, pada akhir dekade 1940-an (pasca PD II), ekonomi pembangunan menjadi bidang kajian yang paling sering dibahas, seiring dengan terbebasnya banyak negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin dari belenggu penjajahan, dan adanya keinginan dari negara-negara tersebut untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Menurut Meier & Rouch (2000) selama dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an, kebijakan-kebijakan pembangunan ditujukan terutama sekali pada maksimisasi pertumbuhan GNP melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Oleh karena adanya pandangan yang tidak mempercayai mekanisme pasar dan pendapat tentang terjadinya kegagalan pasar (*market failure*), maka pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan antara lain menerapkan sistem perencanaan terpusat untuk meningkatkan investasi modal fiskal, pemanfaatan surplus tenaga kerja, pengembangan industri substitusi impor (ISI), dan mencari bantuan luar negeri. Strategi pembangunan saat itu ditekankan pada pembangunan ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi, sementara pembangunan di bidang lainnya diarahkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi dan mengikuti irama pembangunan di bidang ini.

Kenyataannya, strategi ini mengarahkan kita pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua kutub strategi pembangunan yang sering kali saling mengabaikan (*trade off*). Artinya, pembangunan yang menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi cenderung akan “mengorbankan” aspek pemerataan, begitu juga sebaliknya. Dan sayangnya, pada umumnya pilihan kebijakan jatuh pada kebijakan pemacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harapan pemerataan hasil pembangunan pada akhirnya akan diraih melalui mekanisme tetesan ke bawah (*trickle down effect*). Artinya, proses pemerataan pendapatan akan terjadi secara otomatis setelah pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi.

Namun, keberhasilan pembangunan yang ditinjau dari tolok ukur ekonomi klasik tersebut tampaknya tidak sepenuhnya mampu mencerminkan

kenyataan hidup yang sebenarnya di dalam masyarakat. Angka-angka yang ditunjukkan oleh pendapatan nasional bruto (PNB) atau produk nasional bruto/produk domestik bruto (PNB/PDB tidak cukup peka dalam mengungkapkan *state of mind* masyarakat. Apalagi ditambah kenyataan bahwa sering kali jurang perbedaan antara kelompok kaya dan miskin yang semakin melebar seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pada masa itu, banyak di antara negara yang baru merdeka (Negara Sedang Berkembang = NSB) terlahir dan hidup dalam tatanan konfigurasi ekonomi yang suram. Hal tersebut diindikasikan oleh angka pertumbuhan ekonomi yang lambat dan angka inflasi sangat tinggi. Konfigurasi yang suram tersebut tidak memberikan batas toleransi yang longgar bagi para pembuat kebijakan di NSB untuk berbuat ‘kesalahan’. Peluang untuk membuat kesalahan (*margin of error*) yang sedemikian sempit, tidak memberikan ruang gerak yang cukup untuk memilih berbagai alternatif model pembangunan, kecuali hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan sehingga aspek-aspek sosial pun menjadi terabaikan dan masalah kemiskinan tidak terselesaikan.

Memasuki dekade 1960-an akhir dan awal dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Beberapa ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan yang tercermin pada kenaikan angka-angka GNP tiap tahunnya belum mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan dan ketimpangan sehingga “makna” pembangunan kembali dipertanyakan.

Adanya keprihatinan di kalangan para pemerhati masalah-masalah pembangunan telah mendorong munculnya gagasan-gagasan baru tentang strategi pembangunan yang lebih bermakna bagi semua. Bank Dunia memperkenalkan pendekatan pembangunan pertumbuhan dengan pemerataan (*redistribution with growth*) dan ILO (*International Labor Organization*) menawarkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) sebagai solusi. Sedangkan literatur pembangunan lainnya ada yang menekankan perlunya pergeseran orientasi dari pembangunan industri menuju pembangunan perdesaan; pergeseran penekanan dari pembentukan modal fisik menuju pembentukan modal insani (*human capital*) sebagai modal utama pembangunan; dan pentingnya penerapan teknologi tepat guna

(*appropriate technology*) bagi setiap negara. Namun, problematika pembangunan yang rumit, kronis, dan kait-mengait di NSB tak kunjung terselesaikan juga.

Perubahan yang paling mendasar pada fokus ekonomi pembangunan terjadi selama dekade 1970-an dan dekade 1980-an yang dikenal dengan istilah era 'kebangkitan ekonomi neoklasik' (*resurgence of neoclassical economics*). Jika pada dekade 1950-an para ekonom pembangunan mencoba merumuskan teori yang dianggap bisa berlaku umum (*grand theories*) dan strategi-strategi yang bersifat umum di dalam upaya memecahkan permasalahan di NSB, pada dekade 1970-an dan 1980-an sebaliknya. Fokus kajian ekonomi pembangunan sudah lebih ditekankan pada analisis tentang keberagaman NSB dan pengidentifikasian faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan tingkat kinerja ekonomi dari setiap negara. Analisis berubah dari model pertumbuhan yang sangat makro agregatif menuju ke model mikro yang disagregatif. Studi mulai diarahkan pada kekhususan karakteristik suatu negara berdasarkan kondisi empirisnya dan penggunaan asumsi yang berbeda-beda ketika menganalisis masalah di setiap NSB. Oleh karena itu, perlu kehatian-hatian di dalam proses pengidentifikasian hubungan-hubungan kelembagaan. Unsur-unsur – misalnya penduduk, institusi, dan ketersediaan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) - yang selama ini dianggap sebagai hal *given* menjadi variabel endogen yang penting di dalam analisis pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional yang juga mencakup perubahan-perubahan yang mendasar di dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (*institutional development*), selain aspek-aspek ekonomi seperti kenaikan pendapatan per kapita, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

B. PEMBANGUNAN EKONOMI ATAU PERTUMBUHAN EKONOMI ?

Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional - di mana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama - untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan

karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an – seperti telah disinggung di muka – itu menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan GNP saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar di NSB. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di NSB yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi secara sempit.

Oleh karena itu, Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Nilai-nilai pokok tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999: 3) – pemenang Nobel Ekonomi 1998 - bahwa '*development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*'.

Akhirnya disadari bahwa definisi pembangunan ekonomi itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:

1. suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu;
2. usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
3. peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang;
4. perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). sistem kelembagaan ini bisa ditinjau

dari dua aspek yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main (*rule of the games*), baik aturan formal maupun informal; dan organisasi (*players*) yang mengimplementasikan aturan main tersebut.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi juga perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan GDP atau GNP.

Namun demikian, proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi. Perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi, selain masalah pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2003). Artinya, tujuan pembangunan harus difokuskan kepada tingkat kesejahteraan individu (masyarakat) moril dan material yang disebut dengan istilah depoperisasi (*depauperization*) oleh Adelman (1975). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi hanya didefinisikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.

Namun demikian, ada beberapa ekonom memberikan definisi yang sama untuk kedua istilah tersebut, khususnya dalam konteks negara maju. Secara umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di NSB.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan evolusi fokus ekonomi pembangunan dan pembangunan Ekonomi!
- 2) Pada era modern saat ini, bagaimanakah pada umumnya pembangunan ekonomi didefinisikan? Jelaskan unsur-unsur pokok yang terkandung dalam definisi tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Selama dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an, kebijakan-kebijakan pembangunan ditujukan, terutama sekali, untuk maksimisasi pertumbuhan ekonomi melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Memasuki akhir dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an, mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pada bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Perubahan yang paling mendasar pada fokus ekonomi pembangunan terjadi selama dekade 1970-an dan dekade 1980-an. Fokus kajian ekonomi pembangunan sudah lebih ditekankan pada analisis tentang keberagaman negara sedang berkembang (NSB) dan pengidentifikasian faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan tingkat kinerja ekonomi dari setiap negara. Pada masa ini, pembangunan ekonomi semakin disadari bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya aspek ekonomi.
- 2) Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Unsur-unsur pokok dari definisi pembangunan ekonomi tersebut yaitu:
 - a. proses, dalam artian pembangunan merupakan suatu proses atau perubahan yang terjadi secara kontinu;

- b. peningkatan pendapatan per kapita, dalam artian pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
- c. peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, dalam artian pembangunan terjadi ketika terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu dalam jangka panjang, dan
- d. perbaikan sistem kelembagaan, dalam artian pembangunan harus mencakup perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya), baik dari aspek perbaikan di bidang aturan main (*rule of the games*) maupun organisasi (*players*) yang mengimplementasikan aturan main tersebut.



RANGKUMAN

Selama dekade 1950-an hingga awal dekade 1960-an, kebijakan-kebijakan pembangunan ditujukan, terutama sekali, untuk maksimisasi pertumbuhan ekonomi melalui proses akumulasi modal dan industrialisasi. Meskipun demikian, tolok ukur ekonomi tersebut tampaknya tidak sepenuhnya menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Memasuki akhir dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi, mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan, seperti pendekatan pembangunan pertumbuhan dengan pemerataan (*redistribution with growth*) dan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Meskipun demikian, pemikiran tersebut tidak mengerucut pada suatu solusi yang mampu mengatasi problematika pembangunan yang terjadi.

Perubahan yang paling mendasar pada fokus ekonomi pembangunan terjadi selama dekade 1970-an dan dekade 1980-an. Fokus kajian ekonomi pembangunan sudah lebih ditekankan pada analisis tentang keberagaman negara sedang berkembang (NSB) dan pengidentifikasian faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan tingkat kinerja ekonomi dari setiap negara. Pada masa ini pembangunan semakin dilihat sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan yang mendasar di dalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan sistem

kelembagaan (*institutional development*), selain aspek-aspek ekonomi seperti kenaikan pendapatan per kapita, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Langkah yang dilakukan pemerintah untuk perencanaan akibat adanya kegagalan pasar dan hilangnya kepercayaan terhadap mekanisme pasar adalah
 - A. pemberian subsidi dan penciptaan lapangan kerja baru
 - B. privatisasi BUMN dan penguasaan pasar oleh pemerintah
 - C. meningkatkan investasi modal fiskal dan pengembangan industri substitusi impor
 - D. industrialisasi dan pemberian hutang

- 2) Pengertian pembangunan ekonomi secara umum adalah
 - A. peningkatan teknologi produksi dan daya beli masyarakat berlangsung terus dan berkelanjutan
 - B. kegiatan oleh negara dengan tujuan menjamin penambahan modal dan ketersediaan barang kebutuhan
 - C. meningkatnya jumlah barang yang dikonsumsi dan peningkatan kepuasan masyarakat
 - D. kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya

- 3) Perbaikan dalam sistem kelembagaan dapat ditinjau dari perbaikan dari aspek
 - A. bidang aturan main dan organisasi
 - B. keterserapan tenaga kerja dan sistem upah
 - C. peraturan dan sanksi
 - D. penggunaan teknologi dan output produksi

- 4) Sistem ekonomi dengan konfigurasi yang suram diindikasikan oleh
- peningkatan teknologi produksi dan daya beli
 - penambahan modal dan ketersediaan barang kebutuhan
 - meningkatkan jumlah barang yang dikonsumsi dan peningkatan kepuasan
 - pertumbuhan ekonomi lambat dan inflasi tinggi
- 5) Literatur pembangunan yang sangat diperlukan dalam usaha pertumbuhan pembangunan di antaranya adalah
- pergeseran orientasi dari pembangunan industri menuju pembangunan perdesaan
 - pembentukan industri padat modal
 - penciptaan dana talangan dengan bantuan Bank Dunia
 - penggunaan teknologi modern dan mengesampingkan penyerapan tenaga kerja

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Indikator Pembangunan

A. MENGUKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

Pengertian pembangunan itu sangat luas, seperti telah dibahas pada Kegiatan Belajar 1. Tidak hanya sekedar proses peningkatan GNP per kapita saja, tetapi juga bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek (ekonomi, sosial, dan politik) dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu seperti telah dibahas di KB 1 pembangunan ekonomi sering kali didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi, proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi, tetapi perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), dan perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pengertian tentang pembangunan ekonomi tersebut, diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak pembangunan setiap negara atau suatu wilayah. Indikator-indikator tersebut dapat bersifat fisikal, ekonomi, sosial, dan politik. Berikut ini dibahas beberapa indikator keberhasilan pembangunan yang dikelompokkan menjadi tiga indikator yaitu: indikator moneter, indikator nonmoneter, dan indikator campuran.

B. INDIKATOR MONETER

1. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita itu sendiri merupakan indikator atas kinerja

perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara.

Beberapa ekonom memandang bahwa pendapatan per kapita bukanlah indikator yang terbaik untuk menilai kinerja pembangunan suatu negara, karena seperti telah disinggung di muka pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi juga harus disertai oleh perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang sebelumnya menjadi penghambat kemajuan-kemajuan ekonomi. Namun demikian, meskipun pendekatan pendapatan per kapita ini dianggap memiliki kelemahan yang cukup mendasar sebagai indikator keberhasilan pembangunan, pendekatan ini masih relevan dan sering digunakan serta mudah untuk dipahami. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah karena difokuskan pada esensi pokok (*raison d'etre*) dari pembangunan yaitu meningkatnya standar dan kualitas hidup masyarakat serta berkurangnya angka kemiskinan. Dengan kata lain, pendapatan per kapita bukanlah sebuah indikator ukuran (*proxy*) yang buruk dari struktur ekonomi dan sosial masyarakat.

Pendapatan per kapita juga merupakan salah satu variabel penting dalam pembahasan ekonomi makro. Selain digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara dari masa ke masa, melihat struktur perekonomian suatu negara, serta membandingkan kinerja perekonomian satu negara dengan negara-negara lain.

2. Kelemahan Umum Pendekatan Pendapatan per Kapita

Salah satu kelemahan mendasar dari pendapatan per kapita sebagai sebuah indikator pembangunan terletak pada ketidakmampuannya untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh. Sering kali adanya kenaikan pendapatan per kapita suatu negara tidak disertai oleh perbaikan kualitas hidup masyarakatnya. Sebenarnya, sudah sejak lama ada keraguan pada konsep pendapatan per kapita sebagai sebuah cerminan dari tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Namun, kita harus tetap menyadari bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka, meskipun di samping itu ada beberapa faktor lain (nonekonomi) yang dinilai cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan mereka.

Faktor-faktor nonekonomi - seperti adat istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, serta ada atau tidaknya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan

bertindak merupakan faktor-faktor yang juga dapat menyebabkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan di negara-negara yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang relatif sama. Misalnya, apabila penduduk di daerah pegunungan kita asumsikan mempunyai tingkat pendapatan yang relatif sama dengan penduduk yang hidup di daerah dataran rendah. Berdasarkan pada perbedaan kondisi alam dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di daerah dataran rendah adalah lebih tinggi, karena pada umumnya penduduk di daerah dataran rendah menghadapi tantangan alam yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan penduduk di daerah pegunungan. Di daerah dataran rendah, iklimnya tidak terlalu dingin, pekerjaan bertani dan bercocok tanam pun lebih mudah dilakukan, dan energi yang dikeluarkan untuk perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya relatif lebih sedikit.

Ada tidaknya kebebasan dalam bertindak dan mengeluarkan pendapat juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak adanya kebebasan dalam bertindak dan mengeluarkan pendapat di suatu negara (misalnya, pada negara-negara yang bersifat otoritarian) menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya selalu dipandang lebih rendah dari yang dicerminkan oleh tingkat pertumbuhan ekonominya.

Selain itu, beberapa ekonom memandang bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subyektif. Artinya, setiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara hidup yang berbeda. Dengan demikian memberikan nilai yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Ada sekelompok orang yang lebih menekankan pada akumulasi kekayaan dan tingkat pendapatan yang tinggi sebagai unsur penting untuk mencapai sebuah kepuasan hidup. Tetapi ada pula sekelompok orang yang lebih suka untuk menikmati waktu senggang (*leisure time*) yang lebih banyak dan enggan untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Di samping hal-hal yang dikemukakan di atas, perlu pula diingat bahwa pembangunan ekonomi mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan masyarakat, misalnya hilangnya rasa komunalitas sehingga masyarakat menjadi bersifat lebih individualistis, hubungan antara anggota masyarakat menjadi lebih formal, dan sebagainya. Jadi, kadang di satu sisi, pembangunan ekonomi dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ini

harus dicapai dengan beberapa pengorbanan dalam perilaku dan sikap hidup masyarakat. W. Arthur Lewis (1984) – pemenang Nobel Ekonomi 1979 – mengatakan: "... *like everything else, economic growth has its costs*" yang berarti bahwa pembangunan ekonomi selain memberi manfaat kepada masyarakat, juga membutuhkan sebuah pengorbanan.

2. Kelemahan Metodologis Pendekatan Pendapatan per Kapita

Secara metodologis, pendapatan per kapita sebagai indeks yang menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar masyarakat ternyata memiliki kelemahan. Kelemahan itu timbul karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara, misalnya struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, kondisi sosial-budaya, dan perbedaan nilai tukar (kurs) satu mata uang terhadap mata uang yang lain.

Di NSB biasanya proporsi penduduk di bawah umur dan usia muda relatif lebih tinggi ketimbang di negara-negara maju. Dengan demikian, perbandingan pendapatan setiap keluarga di kedua kelompok negara itu tidaklah seburuk seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka. Misalnya, keluarga Pak Amir terdiri dari 5 anggota keluarga dengan pendapatan US \$1.000 dan keluarga Pak Badu terdiri dari 3 anggota keluarga dengan pendapatan US \$750. Meskipun pendapatan per kapita anggota keluarga Pak Amir lebih rendah dibandingkan pendapatan per kapita anggota keluarga Pak Badu, sangat mungkin keluarga Pak Amir mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga Pak Badu, karena beberapa jenis pengeluaran seperti rekening air dan listrik, perumahan, serta barang-barang lain yang digunakan secara bersama-sama tidak banyak berbeda di antara kedua keluarga tersebut.

Selain tingkat pendapatan, distribusi pendapatan merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor ini sering kali kurang diperhatikan dalam perhitungan tingkat pendapatan per kapita, karena asumsi pokok yang digunakan dalam konsep pendapatan per kapita adalah *one dollar, one man*, yang artinya setiap orang memiliki proporsi yang sama atas pembentukan pendapatan per kapita. Berdasarkan pengalaman negara-maju, pada tahap awal pembangunan biasanya kondisi distribusi pendapatan ini akan memburuk, tetapi pada tahap akhirnya distribusi pendapatan ini semakin baik. Namun demikian, perkembangan di

banyak NSB menunjukkan bahwa seiring dengan proses pembangunannya, kondisi distribusi pendapatan sering kali justru semakin buruk.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan terhadap usaha-usaha pembangunan di beberapa NSB, karena usaha-usaha pembangunan dianggap hanya menguntungkan sebagian kecil anggota masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi belum tercapai sepenuhnya.

Tabel 1.1
Perbandingan GNP per kapita Menurut Kurs Pasar dan Paritas Daya Beli (PPP)
Beberapa Negara, 2007

Negara	GNP per kapita menurut kurs pasar (US \$)	GNP per kapita menurut PPP (US \$)
<i>Negara-negara ASEAN:</i>		
Kamboja	540	1.690
Laos	580	1.940
Vietnam	790	2.550
Indonesia	1.650	3.580
Filipina	1.620	3.730
Thailand	3.400	7.880
Malaysia	6.540	13.570
Singapura	32.470	48.520
<i>Newly Industrializing Countries:</i>		
Korea Selatan	19.690	24.750
Hongkong	31.610	44.050
Singapura	32.470	48.520
Taiwan	16.590.	30.100.
<i>Negara Maju/Industri:</i>		
Australia	35.960	33.340
Jerman	38.860	33.820
Belanda	45.820	39.500
Inggris	42.740	34.370
Jepang	37.670	34.600
Amerika Serikat	46.040	45.850
Swiss	59.880	43.080

Sumber: World Development Report (2009)

Pada Tabel 1.1 di atas tampak bahwa GNP per kapita Indonesia berada di bawah beberapa negara ASEAN lainnya, baik menurut harga pasar maupun menurut PPP. Sementara Singapura yang merupakan negara terkecil dilihat dari luas wilayahnya di kawasan ASEAN dan dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta orang mempunyai tingkat pendapatan per kapita menurut harga pasar yang tertinggi yaitu sebesar US \$32.470.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat berbeda, meskipun tingkat pendapatan per kapitanya relatif sama:

- a. Pola pengeluaran masyarakat. Perbedaan pola pengeluaran masyarakat menyebabkan dua negara dengan pendapatan per kapita yang sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Misalnya, kita asumsikan ada dua orang dengan tingkat pendapatan relatif sama, tetapi salah seorang di antaranya harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih tinggi untuk pergi ke tempat kerja, harus berpakaian necis, dan sebagainya, sementara yang satu tidak. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa kedua orang tersebut mempunyai tingkat kesejahteraan yang sama tingginya.
- b. Perbedaan iklim. Adanya perbedaan iklim juga memungkinkan timbulnya perbedaan pola pengeluaran masyarakat di negara-negara maju dan NSB. Masyarakat di negara maju harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan yang sama dengan di NSB. Seperti kita ketahui, sebagian besar negara maju beriklim dingin dan sebagian besar NSB beriklim tropis. Oleh karena itu, penduduk negara-negara maju sering kali harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk dapat menikmati “iklim tropis” seperti yang biasa dinikmati oleh penduduk NSB. Pada musim dingin masyarakat negara maju harus mengeluarkan tambahan pengeluaran yang cukup besar untuk biaya pemanasan (*heater*) di rumahnya, dan biaya pendingin udara (*air-conditioned*) di musim panas.
- c. Struktur produksi nasional. Adanya perbedaan yang mencolok pada komposisi sektoral juga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional (pengeluaran) yang digunakan untuk anggaran pertahanan dan pembentukan modal (2) lebih tinggi dibandingkan di negara lain yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang relatif sama.

Selama ini, metode perhitungan pendapatan nasional bersifat agregatif sehingga tidak dapat menunjukkan perubahan serta distribusi sektoral. Misalnya, jika sektor pertanian memiliki proporsi sebesar 50 persen dari GNP dan sektor nonpertanian juga 50 persen dari GNP, maka jika GNP tumbuh sebesar 10 persen per tahunnya, kemungkinan distribusinya seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Distribusi Pertumbuhan Sektoral

SEKTOR	Persentase kenaikan sektoral			
	A	B	C	D
Pertumbuhan sektor pertanian	5	4	2	0
Pertumbuhan sektor non-pertanian	5	6	8	10

Kombinasi D menunjukkan adanya stagnasi di sektor pertanian. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pembangunan sektor pertanian mengalami kegagalan. Padahal sebagian besar penduduk NSB menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Keadaan ini pada akhirnya akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan penduduk di sektor tersebut semakin buruk.

Masih berkaitan dengan metode perhitungan pendapatan nasional, ada anggapan bahwa harga pasar suatu barang mencerminkan nilai sosial dari barang tersebut. Anggapan tersebut tidak selamanya benar karena adanya ketidaksempurnaan pasar (*market imperfection*) sebagai akibat dari: adanya beberapa hasil produksi yang tidak dipasarkan. Keadaan ini sering kali tampak di wilayah perdesaan, seperti adanya pola pertanian subsisten, di mana masyarakat menanam berbagai macam hasil bumi untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini tentu saja akan membuat tingkat pendapatan nasional menjadi lebih rendah dari yang semestinya.

Adanya perbedaan nilai tukar juga mengakibatkan perbandingan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara maju dan NSB selalu timpang sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan jauh lebih besar daripada yang sebenarnya terjadi di antara kedua kelompok negara tersebut. Sebagai contoh, Usher (1963) mengestimasi bahwa perbandingan pendapatan per kapita antara Inggris dan Thailand adalah 1 : 13,06. Artinya, jumlah pendapatan per kapita Inggris adalah 13,06 kali lebih besar daripada pendapatan per kapita Thailand. Angka perbandingan tersebut didapatkan

jika pendapatan nasional Thailand dalam mata uangnya sendiri (baht) dikonversikan terhadap poundsterling pada tingkat kurs yang berlaku. Namun, jika pendapatan per kapita Inggris dan Thailand dinilai secara langsung pada tingkat harga di Thailand maka perbandingan tersebut hanya 1 : 6,27, dan jika pendapatan per kapita antara kedua negara tersebut dinilai pada tingkat harga di Inggris maka perbandingan tersebut akan turun menjadi 1 : 2,76.

Sementara itu, pada awal dekade 1950-an, Millikan (1950) dalam Balassa (1961) juga mengestimasi tingkat pendapatan per kapita negara-negara di kawasan Asia (kecuali Timur Tengah). Menurut perhitungan konvensional, pendapatan per kapita negara-negara di kawasan tersebut adalah US \$58, namun menurut hasil estimasi Millikan, pendapatan per kapita dari negara-negara di kawasan tersebut mencapai US \$195. Untuk negara-negara di kawasan Afrika menurut perhitungan konvensional nilai pendapatan per kapita mereka adalah US \$48, tetapi setelah dilakukan estimasi ulang ternyata nilai sebenarnya adalah US \$117. Sebagai bahan pembandingan, dari studi yang dilakukan oleh Gilbert dan Kravis (1956) diperoleh temuan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di beberapa negara maju ternyata lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pendapatan per kapita mereka.

Kesalahan dalam mengestimasi tingkat pendapatan per kapita di NSB disebabkan oleh adanya “ketidaksempurnaan” dalam metode penghitungan pendapatan per kapita. Ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu:

- a. adanya masalah dalam menentukan jenis-jenis kegiatan yang harus dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Selama ini jenis-jenis kegiatan yang dimasukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional adalah setiap kegiatan hasilnya dijual ke pasar. Hal ini berarti pemilik faktor produksi memperoleh balas jasa atas kegiatannya tersebut. Padahal di NSB banyak sekali kegiatan produktif yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional yang seharusnya dapat dinilai misalnya mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan di rumah;
- b. Adanya kesulitan dalam mengonversi nilai pendapatan per kapita dari mata uang suatu negara ke mata uang negara lainnya. Biasanya nilai tukar resmi mata uang suatu negara dengan negara lain tidak mencerminkan perbandingan tingkat harga di kedua negara tersebut. Misalnya, kita asumsikan nilai tukar resmi antara mata uang negara kita

(rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat adalah 1 US \$ = Rp10.000. Secara teoritis, hal ini berarti harga sebuah barang yang ada di Amerika Serikat apabila dikalikan dengan Rp 10.000 maka harus sama nilainya dengan barang yang sama di Indonesia. Namun kenyataannya, nilai (harga) barang tersebut di Indonesia bisa lebih kecil atau malah lebih besar dari nilai (harga) yang seharusnya secara teoritis.

C. INDIKATOR NON-MONETER

1. Indikator Sosial

Beckerman dalam *International Comparisons of Real Incomes* (1966) mengelompokkan berbagai studi mengenai metode untuk membandingkan tingkat kesejahteraan suatu negara ke dalam tiga kelompok: (1) kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan di beberapa negara dengan memperbaiki metode yang digunakan dalam perhitungan pendapatan konvensional. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis (1956), (2) kelompok yang membuat penyesuaian dalam perhitungan pendapatan nasional dengan mempertimbangkan adanya perbedaan tingkat harga di setiap negara, dan (3) kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (*nonmonetary indicators*), seperti jumlah kendaraan bermotor, tingkat elektrifikasi, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennet.

Menurut Beckerman (1966), dari berbagai metode di atas, metode yang digunakan oleh Gilbert & Kravis (1956) adalah metode yang paling sempurna. Pada metode ini, dilakukan perbaikan pada metode perhitungan pendapatan konvensional dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing-masing negara. Dengan studinya, mereka membandingkan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Mereka melakukan perhitungan kembali pada pendapatan nasional negara-negara di kawasan Eropa berdasarkan atas tingkat harga di Amerika Serikat. Dengan kata lain, nilai produksi negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat di nilai dengan tingkat harga yang sama. Kesimpulan dari studi yang dilakukan Gilbert & Kravis (1956) adalah bahwa perbedaan tingkat pendapatan per kapita antara penduduk negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat tidaklah sebesar seperti yang

ditunjukkan oleh perbedaan tingkat pendapatan per kapita mereka yang dihitung menurut metode konvensional.

Namun, metode ini memerlukan data yang lengkap dan sering kali data yang diperlukan dalam estimasi tidak tersedia di NSB. Oleh karena itu, Beckerman (1966) mengemukakan metode lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter. Metode ini dinamakan *Indikator Nonmoneter yang Disederhanakan (modified non-monetary indicators)*.

Menurut metode ini, tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan oleh beberapa indikator berdasarkan pada tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di NSB. Data tersebut adalah:

- a. Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg).
- b. Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton).
- c. Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.
- d. Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10.
- e. Jumlah persediaan telepon dikalikan 10.
- f. Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.
- g. Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).

Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara dilakukan pula oleh *United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)*, sebuah badan PBB yang berpusat di Jenewa pada tahun 1970. Dalam studinya, UNSRID (1970) menggunakan 18 indikator yang terdiri dari 10 indikator ekonomi dan 8 indikator sosial yaitu:

- a. Tingkat harapan hidup.
- b. Konsumsi protein hewani per kapita.
- c. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah.
- d. Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan.
- e. Jumlah surat kabar.
- f. Jumlah telepon.
- g. Jumlah radio.
- h. Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih.

- i. Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian.
- j. Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, perdagangan, dan komunikasi.
- k. Persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji atau upah.
- l. Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industri-industri manufaktur.
- m. Konsumsi energi per kapita.
- n. Konsumsi listrik per kapita.
- o. Konsumsi baja per kapita.
- p. Nilai per kapita perdagangan luar negeri.
- q. Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian.
- r. Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB).

Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan maka dapat dipastikan perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlalu besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka. Hasil studi UNSRID menyebutkan bahwa dari 58 negara yang dihitung indeks pembangunannya, Thailand merupakan negara dengan indeks paling rendah (10), sementara indeks pembangunan Inggris adalah 104. Oleh karena itu, secara relatif dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan Inggris 10 kali lebih besar dari Thailand. Nilai tersebut jelas lebih kecil dari perbandingan pendapatan per kapita kedua negara tersebut. Hasil studi Usher (1963) seperti telah disinggung sebelumnya menyebutkan bahwa perbandingan pendapatan per kapita antara Inggris dan Thailand dengan cara konvensional menghasilkan angka 1 : 13,06. Artinya, pendapatan Inggris adalah 13,06 kali pendapatan per kapita Thailand.

Di antara negara-negara maju, perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan oleh indeks pembangunan sering kali lebih kecil dibandingkan jika menggunakan tolok ukur pendapatan per kapita mereka. Misalnya, pada tahun 1970, perbandingan pendapatan per kapita Belanda dan Swedia adalah US \$965 dan US \$1,696, sebuah perbedaan yang sangat besar. Sedangkan perbandingan indeks pembangunan mereka menunjukkan bahwa tingkat pembangunan yang dicapai kedua negara tersebut tidak banyak berbeda yaitu 96 : 103. Kesimpulan yang diperoleh dari studi UNSRID adalah bahwa di banyak negara, pembangunan sosial berlangsung lebih cepat dibandingkan pembangunan ekonominya.

2. Indeks Kualitas Hidup

Pada tahun 1979, Morris D. Morris memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau *Physical Quality of Life Index*. Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf.

Berdasarkan setiap indikator tersebut dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi skor antara 1 sampai 100, angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas atas (*upper limit*) 100 ditetapkan 77 tahun (harapan hidup tertinggi pada saat studi tersebut dilakukan dicapai oleh Swedia). Sedangkan batas bawah (*lower limit*) adalah 28 tahun (tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan batas bawah itulah, tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya 9 kematian per 1.000 kelahiran (juga dicapai Swedia pada tahun 1973), sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1.000 kelahiran (tingkat kematian bayi tertinggi, di Gabon).

Angka Indeks Kualitas Hidup (IKH) dapat diperoleh dengan rumus:

$$IKH = \frac{IHH + IKB + IMH}{3}$$

di mana IHH adalah indeks harapan hidup, IKB adalah tingkat kematian bayi per 1.000 kelahiran, dan IMH adalah indeks melek huruf.

a. *Indeks Harapan Hidup dapat dihitung dengan menggunakan rumus:*

$$IHH = \frac{(IH - 28)}{0,39}$$

di mana IH adalah harapan hidup per satu tahun kelahiran di suatu negara, 28 adalah tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950, dan 0,39 adalah angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 tahun, maka akan menghasilkan 1 poin angka indeks.

b. *Indeks Kematian Bayi dapat di ukur dengan menggunakan formula:*

$$IKB = \frac{229 - \text{tingkat kematian bayi per 100 kelahiran pada sebuah negara}}{2,22}$$

di mana 229 adalah tingkat kematian bayi maksimum (per 1000 penduduk) yang ada di Gabon, 2,22 adalah pembagi yang jika terdapat tingkat kematian bayi terendah yaitu 9 bayi per 1.000 kelahiran, maka akan didapatkan indeks = 100.

c. *Indeks Melek Huruf (IMH) sama dengan persentase tingkat melek huruf yaitu jumlah melek huruf per 100 orang dewasa.*

Kesimpulan umum yang didapat dari studi Morris (1979) adalah bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah cenderung memiliki IKH yang rendah pula. Namun, hubungan antara pendapatan per kapita dan IKH tidak selamanya searah. Sejumlah negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru malah memiliki IKH yang rendah, bahkan lebih rendah dari IKH negara-negara miskin. Di sisi lain, sejumlah negara dengan jumlah pendapatan per kapita yang rendah justru memiliki IKH yang lebih tinggi dari negara-negara berpenghasilan menengah ke atas.

Secara umum, Tabel 1.3 menunjukkan bahwa IKH untuk kelompok negara-negara maju jauh lebih tinggi dari IKH kelompok NSB. Namun di sisi lain, dari data tahun 1970 sampai 1990 memperlihatkan bahwa variasi kenaikan skor IKH untuk NSB cukup signifikan. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan “kualitas hidup” penduduk di NSB. Sementara itu, Tabel 1.4 menunjukkan tren IKM di beberapa propinsi di Indonesia pada periode 1970-1990.

Tabel 1.3
Trend Indeks Kualitas Hidup (PQLI) pada 10 Negara

Negara	1970	1980	1990
Kelompok NSB:			
Tanzania	43	48	53
Ethiopia	31	35	46
India	44	49	59
Indonesia	55	62	74

Brazil	68	70	77
Kelompok Negara Maju:			
Maju:	92	94	95
Jepang	91	92	94
Kanada	90	92	93
Inggris	91	92	93
Amerika Serikat	92	93	94
Belanda			

Sumber : Nick van der Lijn, *Measuring Well-Being with Social Indicators*, Tilburg University, 1995

Tabel 1.4
Tren Indeks Kualitas Hidup (PQLI) di Indonesia

No.	Propinsi	1970	1980	1990
1.	Aceh	50	64	78
2.	Sumatera Utara	58	68	79
3.	Sumatera Barat	50	57	75
4.	Riau	54	59	77
5.	Jambi	44	56	74
6.	Sumatera Selatan	47	64	75
7.	Bengkulu	46	59	75
8.	Lampung	48	63	75
9.	DKI Jakarta	54	72	86
10.	Jawa Barat	43	53	68
11.	Jawa Tengah	42	59	73
12.	D.I. Yogyakarta	41	69	80
13.	Jawa Timur	44	57	72
14.	Bali	42	59	76
15.	NTB	30	31	47
16.	NTT	45	51	58
17.	Kalimantan Barat	42	51	67
18.	Kalimantan Tengah	53	63	79
19.	Kalimantan Selatan	48	57	69
20.	Kalimantan Timur	52	62	79
21.	Sulawesi Utara	62	69	80
22.	Sulawesi Tengah	49	56	69

No.	Propinsi	1970	1980	1990
23.	Sulawesi Selatan	38	54	71
24.	Sulawesi Timur	36	54	70
25.	Maluku	51	51	74
26.	<u>Irian Jaya</u>	-	57	64

Sumber: BPS (1992)

D. INDIKATOR CAMPURAN

1. Indikator Susenas Inti

Pada tahun 1992, Biro Pusat Statistik (BPS) mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut Indikator Susenas Inti (*Core Susenas*). Indikator Susenas Inti ini merupakan indikator "campuran" karena terdiri indikator sosial dan ekonomi. Indikator Susenas Inti ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Pendidikan, dengan indikator: tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, dan tingkat partisipasi pendidikan.
- b. Kesehatan, dengan indikator: rata-rata hari sakit dan fasilitas kesehatan yang tersedia.
- c. Perumahan, dengan indikator: sumber air bersih dan listrik, sanitasi, dan kualitas tempat tinggal.
- d. Angkatan Kerja, dengan indikator: partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.
- e. Keluarga Berencana dan Fertilitas, dengan indikator: penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran tenaga kesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi.
- f. Ekonomi, dengan indikator: tingkat konsumsi per kapita.
- g. Kriminalitas, dengan indikator: angka kriminalitas per tahun.
- h. Perjalanan wisata, dengan indikator: frekuensi perjalanan wisata per tahun.
- i. Akses ke media massa, dengan indikator: jumlah surat kabar, jumlah radio, dan jumlah televisi.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 1990, *United Nations for Development Program* (UNDP) mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development*

Index). Nilai IPM ini diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli.

Sama seperti IKH, IPM ini juga digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan berbagai negara di dunia. Berdasarkan indeks IPM-nya, negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50.
- Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,50 sampai 0,79.
- Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai 1.

Tabel 1.5
Indeks Pembangunan Manusia Beberapa Negara Terpilih, 2006

Negara	Tingkat Harapan Hidup (Tahun)	Tingkat Melek Huruf (% Dewasa)	GDP Per Kapita (PPP, US \$)	Nilai IPM
High Human Development				
Norwegia	79,9	99,9	51.862	0,968 (1)
Jepang	82,4	99,9	31.951	0,956 (8)
Amerika Serikat	78,0	99,9	43.968	0,950 (15)
Inggris	79,2	99,9	30.821	0,942 (21)
Israel	80,5	97,1	24.405	0,930 (24)
Singapura	78,9	92,5	47.426	0,918 (28)
Medium Human Development				
Turki	71,6	88,1	11.535	0,798 (76)
Thailand	70,0	93,9	7.613	0,786 (81)
Iran	70,5	84,0	10.031	0,777 (84)
Indonesia	70,1	91,0	3.455	0,726 (109)

Negara	Tingkat Harapan Hidup (Tahun)	Tingkat Melek Huruf (% Dewasa)	GDP Per Kapita (PPP, US \$)	Nilai IPM
India	64,1	65,2	2.489	0,609 (132)
Kamboja	58,1	75,6	1.619	0,575 (136)
Low Human Development				
Nigeria	46,6	71,0	1.852	0,499 (154)
Timor Leste	60,2	50,1	668	0,483 (158)
Ethiopia	52,2	35,9	700	0,389 (169)
Negara Berpenghasilan Tinggi	79,3	99,9	35.062	0,942
Negara Berpenghasilan Menengah	71,1	91,4	6.649	0,774
Negara Berpenghasilan Rendah	60,3	63,8	1.949	0,564

Sumber: UNDP, Human Development Report, 2009

Keterangan: Angka (...) menunjukkan peringkat di dunia

Tabel 1.5 di atas menunjukkan tingkat harapan hidup, persentase melek huruf, pendapatan per kapita, dan nilai IPM beberapa negara terpilih. Negara yang memiliki nilai IPM tertinggi pada tahun 2006 adalah Norwegia (0,968). Sedangkan Indonesia berada pada peringkat 109 dengan nilai IPM sebesar 0,726. Sementara itu, kelompok negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah (*low human development*) hampir semuanya berasal dari kawasan Afrika. Satu hal yang cukup menarik di sini adalah bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi cenderung memiliki nilai IPM yang tinggi pula. Namun, fenomena tersebut tidak terjadi pada semua negara. Misalnya, Iran, suatu negara yang memiliki pendapatan per kapita 1,5 kali lebih besar daripada Thailand, namun nilai IPM Thailand (0,786) relatif lebih tinggi daripada Iran (0,777).

Tabel 1.6
Peringkat IPM Propinsi-propinsi di Indonesia, 2005

	Propinsi	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tingkat Melek Huruf, dewasa (%)	Rata-rata lama pendi- dikan (tahun)	Penge- luaran per kapita (Rp.000)	Nilai IPM
1	DKI Jakarta	72,5	98,3	10,6	619,5	76,1
2	Sulawesi Utara	71,7	99,3	8,8	616,1	74,2
3	Riau	70,7	97,8	8,4	623,2	73,6
4	D. I. Yogyakarta	72,9	86,7	8,4	638,0	73,5
5	Kalimantan Tengah	70,7	97,5	7,8	623,6	73,2
6	Kalimantan Timur	70,3	95,3	8,7	621,4	72,9
7	Sumatra Utara	68,7	97,0	8,5	618,0	72,0
8	Sumatra Barat	68,2	96,0	8,0	618,2	71,2
9	Bengkulu	68,8	94,7	8,0	617,1	71,1
10	Jambi	68,1	96,0	7,5	620,8	71,0
11.	Bangka Belitung	68,1	95,4	6,6	628,0	70,7
12	Sumatra Selatan	68,3	95,9	7,5	610,3	70,2
13	Jawa Barat	67,2	94,6	7,4	619,7	69,9
14	Jawa Tengah	70,6	87,4	6,6	621,4	69,8
15	Bali	70,4	86,2	7,5	618,2	69,8
16	Maluku	66,2	98,0	8,5	597,3	69,2
17	Nanggroe Aceh D.	68,0	96,0	8,4	588,9	69,0
18	Lampung	68,0	93,5	7,2	605,1	68,8
19	Banten	64,0	95,6	8,0	619,2	68,8
20	Sulawesi Tengah	65,4	94,9	7,6	610,3	68,5
21	Jawa Timur	68,5	85,8	6,8	622,2	68,4
22	Sulawesi Selatan	68,7	84,6	7,0	616,8	68,1
23	Maluku Utara	64,2	95,2	8,5	590,3	67,0
24	Sulawesi Tenggara	66,8	91,3	7,6	598,9	67,5
25	Gorontalo	65,0	95,0	6,8	607,8	67,5
26	Kalimantan Selatan	62,1	95,3	7,3	622,7	67,4
27	Kalimantan Barat	65,2	89,0	6,6	609,6	66,2
28	Papua Barat	66,9	85,4	7,2	584,0	64,8
29	Nusa Tenggara Timur	64,9	85,6	6,3	589,8	63,6

	Propinsi	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tingkat Melek Huruf, dewasa (%)	Rata-rata lama pendid-dikan (tahun)	Penge-luaran per kapita (Rp.000)	Nilai IPM
30	Nusa Tenggara Barat	60,5	78,8	6,4	623,2	62,4
31	Papua	67,3	74,9	6,2	585,2	62,1
	Indonesia	68,1	90,9	7,3	619,9	69,6

Sumber: BPS, 2009.

Dari Tabel 1.6 di atas, dapat diketahui indeks pembangunan manusia di 31 propinsi di Indonesia. Berdasarkan IPM-nya, propinsi DKI Jakarta berada pada urutan pertama dengan nilai IPM sebesar 76,1. Sementara propinsi Papua berada urutan terakhir dengan nilai IPM sebesar 62,1. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa propinsi dengan tingkat pengeluaran per kapita yang relatif tinggi akan memiliki angka IPM yang tinggi juga. Misalnya, propinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki pengeluaran per kapita yang relatif tinggi yaitu Rp623,2 ribu rupiah, tetapi IPM-nya hanya 62,4. Berdasarkan kriteria dari UNDP, secara keseluruhan propinsi di Indonesia termasuk dalam propinsi-propinsi dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), dengan kisaran antara 62,1 (0,621) sampai 76,1 (0,761).

Oleh karena itu, pelajaran yang dapat ditarik dari kedua tabel di atas adalah bahwa nilai IPM suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah negara atau daerah tersebut terkait mengenai aspek pembangunan manusianya, bukan hanya pada tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Besarnya proporsi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap aspek pembangunan manusia.

Konsep IPM ini memberikan pelajaran bagi kita tentang apa yang seharusnya dipandang sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Pembangunan berawal dan bertitik tolak dari manusia, dilakukan oleh

manusia, maka sudah semestinya ditujukan pula untuk manusia. Di dalam konsep IPM ini terdapat perpaduan antara aspek-aspek sosial dan ekonomi. Hal tersebut memungkinkan konsep ini untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas bagi kinerja pembangunan suatu negara.

Namun, sama halnya dengan konsep pendapatan per kapita, konsep IPM-pun tidak lepas dari kelemahan dan kritik. Beberapa ekonom menganggap asumsi-asumsi dan taksiran-taksiran dari IPM seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka juga berpendapat bahwa metodologi perhitungan yang digunakan dalam perhitungan IPM terlalu longgar. Selain itu, seringkali data yang kurang layak dan tidak akurat dimasukkan dalam perhitungan sehingga perbandingan IPM antar negara menjadi kurang relevan.

Meskipun ada beberapa kelemahan dan kritik atas konsep IPM, namun konsep ini masih layak digunakan. Selain itu, ketiga indikator utama IPM, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan GNP per kapita rasanya terlalu penting untuk diabaikan. Semua indikator tersebut bisa dijadikan acuan untuk memperdalam pemahaman kita mengenai proses pembangunan yang sedang berjalan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa pendapatan per kapita sering kali tidak mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara?
- 2) Apakah yang kamu ketahui tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM)? Apakah indeks ini mampu menjadi alat yang tepat untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara, misalnya struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, karakteristik pengeluaran masyarakat, kondisi sosial-budaya, perbedaan nilai tukar (kurs) mata uang negara satu terhadap mata uang negara lain, dan struktur produksi antar negara yang berbeda.

- 2) Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*) merupakan sebuah indeks kinerja pembangunan yang dikembangkan oleh *United Nations for Development Program* (UNDP). Nilai IPM ini diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli. IPM digunakan untuk melakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan berbagai negara di dunia. Berdasarkan indeks IPM-nya, negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
- a) Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0 sampai 0,50.
 - b) Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah (*medium human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,50 sampai 0,79.
 - c) Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai IPM antara 0,79 sampai 1.

Konsep IPM cukup mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu negara. Hal ini didasari pemikiran bahwa pembangunan berawal dan bertitik tolak dari manusia, dilakukan oleh manusia, maka sudah semestinya ditujukan pula untuk manusia. Di samping itu, konsep IPM sudah memadukan aspek-aspek sosial dan ekonomi pembangunan. Hal tersebut memungkinkan konsep IPM untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas bagi kinerja pembangunan suatu negara. Meskipun konsep IPM tidak lepas dari kelemahan, seperti taksiran-taksiran dari IPM sering kali tidak sesuai dengan kenyataan dan sering kali terdapat data yang kurang layak atau tidak akurat dalam perhitungan IPM antar negara, konsep ini masih layak digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara.



RANGKUMAN

Sejumlah indikator yang tepat diperlukan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah untuk memperbandingkan tingkat kemajuan

pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak pembangunan setiap negara atau wilayah. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah karena pendekatan ini difokuskan pada *raison d'etre* dari pembangunan, yaitu meningkatnya standar dan kualitas hidup masyarakat serta berkurangnya angka kemiskinan. Meskipun demikian, sering kali, adanya kenaikan pendapatan per kapita suatu negara tidak disertai oleh perbaikan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Hal ini karena pendekatan ini mengabaikan adanya perbedaan karakteristik antar negara, misalnya struktur umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, karakteristik pengeluaran masyarakat, kondisi sosial-budaya, perbedaan nilai tukar (kurs) mata uang negara satu terhadap mata uang negara lain, serta struktur produksi nasional yang berbeda. Kelemahan dari indikator pendapatan per kapita ini mendorong munculnya pendekatan lain yang lebih mampu menggambarkan pembangunan di suatu negara, seperti *Indeks Pembangunan Manusia* yang mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi dalam mengukur pembangunan. Sejak tahun 1990, *Indeks Pembangunan Manusia* yang dihitung berdasarkan rata-rata indikator tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli ini menjadi indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur pembangunan.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kelemahan utama dari tingkat pendapatan per kapita sebagai indikator keberhasilan pembangunan (indeks kesejahteraan) adalah
 - A. adanya anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut
 - B. adanya anggapan bahwa konsep pendapatan per kapita dibuat oleh ekonom barat, padahal keadaan di barat dan di NSB sama sekali berbeda
 - C. adanya anggapan bahwa kenaikan harga umumnya selalu tak dapat dikendalikan sehingga selalu mempengaruhi angka yang diperoleh
 - D. adanya anggapan bahwa kemakmuran dapat dicapai tanpa melalui proses akan tetapi dapat diciptakan oleh kekuasaan pemerintah

- 2) Anggapan bahwa harga pasar dapat menggambarkan nilai sosial dari suatu barang dalam metode perhitungan pendapatan nasional ternyata tidak selalu benar. Hal ini disebabkan oleh
 - A. adanya ketidaksempurnaan pasar sebagai akibat dari adanya produksi yang tidak di pasarkan
 - B. harga pasar biasanya lebih tinggi dari nilai sosial suatu barang
 - C. nilai sosial suatu barang biasanya harus lebih besar dari harga pasarnya
 - D. selisih antara harga pasar dan nilai sosial adalah kerugian yang ditanggung oleh seorang produsen

- 3) Kelebihan pendekatan pendapatan per kapita di dalam menyusun tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah
 - A. tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan jelas
 - B. difokuskan pada peningkatan standar dan kualitas hidup serta berkurangnya angka kemiskinan
 - C. konsentrasi titik kemiskinan dapat digambarkan dengan jelas
 - D. keunggulan potensi suatu wilayah dapat dijelaskan

- 4) Komponen dari indeks pembangunan manusia adalah
 - A. tingkat harapan hidup
 - B. tingkat melek huruf
 - C. pendapatan per kapita nominal
 - D. Jawaban a dan b benar

- 5) Pada tahun 2009, indeks pembangunan manusia negara Thailand adalah 0,786. Berdasarkan klasifikasi UNDP, angka tersebut mengindikasikan
 - A. tingkat pembangunan manusia negara Thailand termasuk tinggi
 - B. tingkat pembangunan manusia negara Thailand termasuk menengah
 - C. tingkat kualitas hidup manusia negara Thailand termasuk tinggi
 - D. tingkat kualitas hidup manusia negara Thailand termasuk menengah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) D
- 3) A
- 4) D
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) A
- 3) B
- 4) D
- 5) B

Daftar Pustaka

- Adelman, Irma. (1975). Development Economics – A Reassessment of Goals, *The American Economic Review*, Vol. 65(2), pp. 302-309.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima, Yogyakarta: STIM YKPN.
- Balassa, Bela. (1961). Patterns of Industrial Growth: Comment, *American Economic Review*, Vol. 51(3), pp. 394-397.
- Beckerman, Wilfred. (1966). *International Comparisons of Real Income*. Paris: OECD Development Centre.
- BPS. (2009). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chenery, Hollis. (1974). *Redistribution with Growth*. Oxford: Oxford University Press.
- Chenery, Hollis & Moises Syrquin. (1975). *Patterns of Development, 1950-1970*. Oxford: Oxford University Press.
- Cypher, James M. & James L. Dietz. (1997). *The Process of Economic Development*. New York: Routledge Publisher.
- Gilbert, Milton & Irving B. Kravis. (1956). An International Comparison of National Products and the Purchasing Power of Currencies, *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 38(2), pp. 232-233.
- Goulet, Dennis. (1971). *The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development*. New York: Atheneum.
- Hardiman, Margaret & James Midgley. (1982). *The Social Dimensions of Development*. New York: John Wiley & Son.
- Hirschman, Albert O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Lewis, W. Arthur. (1984). The State of Development Theory, *American Economic Review*, Vol. 74(1), pp. 1-10.

- Meier, Gerald M. (1989). *Leading Issues in Economic Development*, Fifth edition. New York: Oxford University Press.
- Meier, Gerald M. & James E. Rouch (eds.). (2000). *Leading Issues in Economic Development*, seventh edition. New York: Oxford University Press.
- Meier, Gerald M. & Joseph E. Stiglitz (eds.). (2001). *The Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Morris, Morris D. (1979). *A Physical Quality of Life Index*. Washington, D.C.: Overseas Development Council.
- Reynolds, Lloyd G. (1969). The Content of Development Economics, *The American Economic Review*, Vol. 59(2), pp. 401-408.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Streeten, Paul. (1972). *The Frontiers of Development Studies*. New York: John Wiley & Sons.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. (2003). *Economic Development*, Eight Edition. England: Pearson Education Limited.
- UNDP. (2009). *Human Development Report*.
- UNRISD. (1970). *Contents and Measurement of Socio-economic Development*. Geneva: UNRISD.
- Usher, Dan. (1963). The Thai National Income at United Kingdom Prices, *Bulletin of the Oxford University Institute of Economics & Statistics*, Vol. 25(3), pp.199-215.
- Van der Lijn, Nick. (1995). *Measuring Well-Being with Social Indicators, HDIS, PQLI, and BWI for 133 countries for 1975, 1980, 1985, 1988, and 1992*, Tilburg University.
- World Bank. (2009). *World Development Report 2009*. Oxford: Oxford University Press.